

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PONTIANAK TAHUN 2013

Oleh:
ARINDA ZAIN^{1*}
NIM. E02111015

Dr. Dwi Haryono, M. Si², Drs. Sy. Usmulyadi, M. Si²

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
2. Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

*email: ciarza73@gmail.com

Abstrak

Persaingan politik pada saat pesta demokrasi adalah hal yang lumrah. Persaingan tersebut terkemas dalam berbagai macam bentuk, mulai dari persaingan siapa calon kandidat, alat peraga kampanye, hingga visi misi yang diusung untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti melihat persaingan dua kandidat dari enam kandidat yang terdaftar dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Pontianak yang berujung pada kesenjangan perolehan suara yang begitu jauh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah Pontianak sehingga menyebabkan kesenjangan perolehan suara antara dua pasang kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah di Pontianak tahun 2013. Kesamaan isu kedua pasang kandidat tersebut menjadi perhatian dalam penelitian ini. Kedua pasang kandidat tersebut adalah pasangan nomor urut 3 yaitu H. Sutarmidji, S.H., M. Hum. dan Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M. dan pasangan nomor urut 6 yaitu Zulkarnaen Siregar, S.H. dan Paryono. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibandingkan identifikasi partai serta isu dan kebijakan, citra kandidat adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku pemilih, terutama pemilih di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.

Kata-kata Kunci: Pemilihan Umum Kepala Daerah; Kandidat; Perilaku Pemilih;

FACTORS THAT AFFECTED VOTERS' BEHAVIOR IN PONTIANAK REGIONAL ELECTIONS IN 2013

Abstract

Competition among political parties during democratic elections is very common. Such competition can have a variety of forms, such as the candidates, campaign properties, the vision and misi promoted to improve electability of the candidates. In this research, the researcher looked at the competition of two of the six candidates who were enrolled in Pontianak Regional Head Election which resulted in a significant difference of votes. This research used a qualitative descriptive method to determine the factors that affect the behavior of voters in the general elections of the regional head of Pontianak, causing a big gap between the two pairs of candidates in the elections of the regional head in Pontianak in 2013. The similarity of the two pairs of candidates issues serve as the focus in this study. Both pairs of candidates were pair number 3: H. Sutarmidji, S.H., M. Hum. and Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M. and pair number 6: Zulkarnaen Siregar, S.H. and Paryono. The results of this study showed that compared to party identification and issues and policies, the image of the candidates is the most of dominant factor that affected the behavior of voters, especially voters in Bansir Laut Village of Southeast Pontianak Subdistrict.

Keywords: Regional Head General Elections; Candidate; Voters' Behavior;

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya proses pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan pemilu. Berbagai macam pemilu yang dikenal dan dijalankan di Indonesia salah satunya adalah pemilihan umum kepala daerah. Seperti yang tercantum di dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yaitu “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*”

Pasal terkait pengisian jabatan kepala daerah di atas merupakan perubahan besar untuk Indonesia terutama bagi daerah, karena dapat memfokuskan perhatian serta mengelola daerah masing-masing secara langsung dengan peraturan daerah masing-masing. Pemilukada yang telah disahkan serta dilaksanakan sejak 2004 lalu tentunya terdapat amanah dan aspirasi rakyat di dalamnya.

Amanah dan mandat politik dari rakyat kepada wakil rakyat yaitu, *pertama*, dengan Pemilukada langsung penguatan demokratisasi ditingkat lokal dapat berwujud, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan legitimasi politik. Karena asumsinya kepala daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara

pemilih nyata (*real voters*) yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik konsitusen pemilih, sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis mendapat dukungan dari sebagian besar warga.

Kedua, dengan Pemilukada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas (pemerintah) lokal (*local accountability*). Ketika seorang kandidat terpilih menjadi kepala daerah, maka pemimpin rakyat yang mendapat mandat tersebut harus meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. *Ketiga*, apabila *local accountability* berhasil diwujudkan maka optimalisasi *equilibrium checks and balance* antar lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan pengurutan proses demokrasi di level lokal. *Keempat*, melalui pemilukada peningkatan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai kebertampakan kualitas partisipasi rakyat diharapkan muncul. (Agustino: 2009)

Menurut S.H. Sarundajang (dalam Suharizal 6:2011), perubahan-perubahan ketentuan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah itu merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan di tingkat lokal (*local government*). Diakui bahwa sejak

lama rakyat telah menghendaki pemilukada dilakukan secara langsung.

Dengan perubahan itu, pada dasarnya pemilukada secara langsung merupakan kelanjutan dari *institutional arrangement* menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Karenanya kemauan orang-orang yang memilih (*volonte generale*) akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya. Suharizal (2011:6)

Dalam setiap pemilihan umum begitu banyak hal yang menjadi sorotan, tidak terkecuali pemilih berserta partisipasinya. Perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut P. Huntington dan Joan Nelson (1994 : 16) salah satu dari wujud partisipasi politik adalah kegiatan pemilihan yang mencakup “*suara, sumbangan-sumabangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil dari proses pemilihan.*”

Berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah seperti yang telah dijabarkan

di atas, maka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak ditahun 2013 dapat dielaborasi lebih dalam lagi. Seperti pemilukada pada umumnya yang tidak bisa dilepaskan dari peran pemilih, pemilukada di Pontianak juga demikian. Sehingga warga Pontianak yang heterogen baik suku, agama maupun tingkat pendidikannya menjadi hal menarik untuk diteliti.

Luas kota pontianak yang mencapai enam kecamatan membuat penelitian ini harus difokuskan pada satu tempat seperti kelurahan agar lebih terarah dan tidak meluas. Kelurahan yang akan diteliti adalah kelurahan Bansir Laut yaitu satu kelurahan dari empat kelurahan dalam wilayah administratif Kecamatan Pontianak Tenggara. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah pemekaran dari Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan yang dimekarkan menjadi Kecamatan Pontianak Tenggara, meliputi Kelurahan Bansir Laut, Bansir Darat, Kelurahan Bangka Belitung Laut dan Kelurahan Bangka Belitung Darat. Berdasarkan peraturan daerah kota Pontianak Nomor 11 tahun 2006 tentang pembentukan 6 kelurahan dan 1 kecamatan di Pontianak.

Kelurahan Bansir Laut merupakan pusat pendidikan yang ada di Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya berbagai jenjang pendidikan yang dimulai dari

Pendidikan Anak Usi Dini (PAUD), hingga ke jenjang pendidikan Strata 2 (S2). Selain itu, posisi jarak ke kecamatan sekitar ± 5 Km dan dari kelurahan ke pusat pemerintahan, kantor wali kota pontianak berjarak ± 4 Km, luas wilayah kelurahan Bansir Laut adalah $2,95 \text{ Km}^2$ atau 295,53 Ha, dengan catatan ± 216 Ha masuk kedalam wilayah Universitas Tanjungpura Pontianak.

Berdasarkan data monografi Kelurahan Bansir Laut, jumlah penduduk kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara hingga akhir Agustus 2013 sejumlah 11.358 jiwa terdiri dari laki-laki 5.782 jiwa, perempuan 5.576 jiwa.

Pada pemilihan umum kepala daerah atau walikota dan wakil walikota Pontianak tahun 2013, jumlah pemilih keseluruhan pemilih di Kecamatan Pontianak Tenggara sebanyak 31.460 pemilih, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
**JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PONTIANAK TAHUN
2013 WILAYAH KECAMATAN PONTIANAK
TENGARA**

No.	KELURAHAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bansir Laut	3.606	3.711	7.317
2	Bansir Darat	2.601	2.546	5.147
3	Bangka Belitung Laut	5.117	5.257	10.374
4	Bangka Belitung Darat	4.398	4.224	8.622
	TOTAL	15.722	15.738	31.460

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Kota Pontianak

Dari total jumlah pemilih di setiap kelurahan, tidak berbanding lurus dengan pemilih yang memberikan suaranya pada saat pemilu berlangsung. Jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya di Kelurahan Bansir Laut sebanyak 7.317 pemilih akan tetapi pada pelaksanaannya hanya ada 4.548 pemilih atau 62,16 % yang memberikan suaranya pada pemilihan tersebut.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan menggunakan hak pilihnya masih sangat rendah. Hal ini secara kasat mata menunjukkan sifat apatis yang dimiliki masyarakat terhadap siapa pemimpin yang akan dipilih untuk melanjutkan pembangunan serta mensejahterakan kehidupan masyarakat perlu diperhatikan dan diketahui apa yang menjadi penyebab sebenarnya.

Tidak terlepas dari apa yang disampaikan di atas, sifat apatis ini biasanya memilih untuk menjadi golongan putih (golput) ketimbang memilih. Pada titik apatisnya, pemilih apatis ini berprinsip *“siapa pun yang terpilih tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.”*

Permasalahan golput sudah menjadi permasalahan yang selalu muncul di setiap pelaksanaan pemilu. Namun betapapun pentingnya permasalahan golput tersebut, ada permasalahan yang tidak kalah penting yang menjadi titik berat permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu kesenjangan perolehan suara antara pasangan nomor urut 3 yaitu H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. dan Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M. dan pasangan dengan nomor urut 6 yaitu Zulkarnaen Siregar, S.H. dan Paryono. Dalam rekapitulasi perolehan suara hasil perhitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota tahun 2013 tingkat kelurahan, pasangan nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 2.489 sedangkan pasangan nomor urut 6 hanya memperoleh 54 suara dari keseluruhan TPS di Kelurahan Bansir Laut yang berjumlah 21 TPS, artinya hanya 1,18 % saja suara yang didapat dari 4.548 pemilih suara sah.

Bertempat di Aula Kantor DPRD Kota, beralamat di Jl. Sutan Abdurahman Pontianak yang berlangsung

pada hari senin tanggal 02 september 2013 dilaksanakan penyampaian program kerja kandidat pemilihan walikota dan wakil walikota yang disusun secara apik agar mudah dipahami program tersebut disampaikan berupa visi misi.

Dari paparan visi misi tersebut, dua kandidat dengan nomor urut 3 dan 6 sama-sama mengangkat isu pendidikan di mana pasangan nomor urut 3 dalam visi misinya di butir pertama yaitu *“Meningkatkan kualitas pendidikan”* sedangkan pasangan nomor urut 6 mencantumkan programnya tersebut pada butir keempat yang berbunyi *“Pendidikan gratis dari SD sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi.”*

Dari dua visi misi yang disampaikan masing-masing kandidat tentu saja cocok untuk daerah yang berbasis pendidikan seperti di Kelurahan Bansir Laut ini. Hal yang selanjutnya menjadi pembahasan adalah kesamaan isu yang diangkat ternyata tidak membuat kedua pasang kandidat menjadi lawan yang seimbang, karena dapat kita lihat pada tabel 1.5, di mana perolehan suara kandidat nomor urut 6 hanya 2,19% dari perolehan suara pasangan nomor urut 3. Maka dari itu isu rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan kesenjangan perolehan suara dua kandidat yang mengangkat isu sama menjadi menarik untuk diteliti.

Dari uraian di atas tentunya sudah tergambar jelas, bahwa dalam proses

pemilihan umum kepala daerah tidak serta merta melulu mengenai isu agama maupun suku bangsa, karena untuk wilayah dengan penduduk yang heterogen seperti Kelurahan Bansir Laut ini tidaklah cocok untuk kedua isu tersebut. Kemudian dari pada itu, wilayah yang berbasis pendidikan tentunya memerlukan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, sehingga isu pendidikan menjadi sangat penting. Berdasarkan ulasan di atas penulis tertarik meneliti dengan judul:

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 DI KELURAHAN BANSIR LAUT”

1.2 Fokus Penelitian

Pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tahun 2013 menghadirkan enam orang kandidat yang telah siap bertarung memperebutkan kursi walikota. Kendati demikian, penelitian ini hanya memfokuskan pada Sutarmidji sebagai kandidat kepala daerah Kota Pontianak dengan nomor urut tiga dan Zukarnaen Siregar sebagai kandidat kepala daerah Kota Pontianak dengan nomor Urut Enam. Kedua kandidat ini dipilih dalam fokus penelitian ini karena peneliti melihat kesenjangan perolehan suara pada pemilihan tersebut sangatlah nampak. Selain itu visi misi juga

merupakan hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan, sebab salah satu visi misi yang ditawarkan oleh kedua kandidat tersebut sama-sama mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan seperti yang telah dijabarkan pada pendahuluan di halaman tujuh. Dari kesamaan salah satu visi misi tersebut peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya perolehan suara Sutarmidji dan rendahnya perolehan suara Zukarnaen Siregar.

Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, peneliti menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang seperti yang disampaikan oleh Nursal (2004:72) di antaranya *social imagery* (citra sosial), *identifikasi partai*, *emotional feeling* (perasaan emosional), *candidate personality* (citra kandidat), *issue and policies* (isu dan kebijakan), *curret event* (peristiwa mutakhir), *personal event* (peristiwa personal), dan *epistemic issue* (isu epistemik). Dari delapan faktor tersebut peneliti memfokuskannya hanya pada tiga faktor saja. Ketiga faktor tersebut ialah *identifikasi partai*, *candidate personality* (citra kandidat), dan *issue and policies* (isu dan kebijakan).

Alasan peneliti memilih tiga faktor dari delapan faktor yang disampaikan Nursal tersebut yang *pertama*, peneliti memilih *Identifikasi partai*, yakni proses panjang sosialisasi kemudian membentuk

ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, seolah-olah semua relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dari pemilu ke pemilu, seseorang selalu memimpin partai atau kandidat yang sama. Kandidat dengan nomor urut tiga yaitu Sutarmidji hadir dalam pemilihan dengan disung oleh partai PPP

Tujuan peneliti menggunakan indentifikasi partai ini adalah untuk mengetahui apakah pemilih memperhatikan apa visi dan misi yang disampaikan atau tidak. Jika pemilih memperhatikan visi dan misi dari kandidat tentunya partai tidak memiliki peranan yang begitu penting dalam sebuah proses pemilihan, terlebih latar belakang kedua kandidat yang memang berbeda. Sutarmidji hadir dalam pemilihan dengan diusung oleh banyak partai di antaranya Partai Karya Peduli Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan Zulkarnaen Siregar hadir sebagai kandidat perseorangan.

Yang kedua, *Issue and Policies* (Isu dan Kebijakan Politik), komponennya mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu. Platform yang sering ditawarkan oleh kandidat pemilu

kepada pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan kebijakan keamanan, kebijakan hukum dan karakteristik kepemimpinan. Tentunya pemilih yang benar-benar memperhatikan apa saja isu dan kebijakan politik apa yang dikeluarkan saat sebelum pemilihan, dan saat pemilihan berlangsung akan lebih selektif dalam menentukan kandidat yang akan dipilihnya.

Kemudian yang ketiga, *Candidate Personality* (Citra Kandidat), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat, beberapa sifat yang merupakan *candidate personality* artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar dan sebagainya. Personality dari seorang kandidat tentu menjadi daya tarik dan nilai tambah tersendiri dari kandidat tersebut. Sehingga tanpa dia perlu banyak menyampaikan janji dalam visi misinya masyarakat telah akan menjatuhkan pilihan kepada kandidat tersebut.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan pembatasan permasalahan penelitian di atas, maka hal yang ingin dikaji oleh peneliti adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Di Kelurahan Bansir Laut?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan permasalahan di atas yakni Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Di Kelurahan Bansir Laut.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu politik khususnya pengembangan dibidang kajian perilaku pemilih.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk semua yang membacanya dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, bagi akademik sebagai pengembangan ilmu politik dan bagi peneliti pribadi untuk menambah pengetahuan ilmu politik, serta bagi instansi dan masyarakat umum.

penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini karena penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang cocok untuk penelitian ini. Kemudian untuk mendeskripsikan tiga faktor dari delapan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Pontianak tahun 2013.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada *genealisasi*.

Menurut Sugiyono (2013). Penelitian kualitatif ialah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Strauss dan Corbin, (dalam Basrowidan Sukidin, 2002). *Qualitative Research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantifikasi lainnya.

Denzin dan Lincoln (dalam Moleog, 2007) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini dalam

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

C. PEMBAHASAN

Menurut Paimin Napitupulu (Dalam Toni dkk, 2006: 301) pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpu pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan dipimpin oleh rakyat. Seluruh rakyat memiliki hak melakukan pemilihan sebagai rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. Jadi, melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan negara dalam proses memilih sebagai rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Sementara itu Samuel Huntington (Dalam Toni dkk, 2006: 301) berpendapat, pemilu sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan

arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.

Pelaksanaan pemilihan umum selalu dikaitkan oleh pemilih. Bagaimana tidak, terpilih atau tidaknya kandidat pemilu adalah karena adanya suara yang diberikan pemilih. Jika tidak ada simpati bahkan suara yang diberikan pemilih maka pupuslah harapan kandidat untuk menjadi pemimpin di daerah pilihannya. Dalam hal ini menarik simpati serta suara dari pemilih menjadi tantangan yang mutlak dihadapi oleh semua kandidat.

Pemilih yang memiliki sifat skeptis tentunya bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh kandidat manapun. Untuk menghindari sifat skeptis dari pemilih, kandidat pemilu tentunya harus mengetahui bagaimana perilaku dari pemilih di daerah pilihannya. Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui perilaku pemilih, di antaranya citra kandidat, isu dan kebijakan, serta identifikasi partai. Faktor-faktor tersebut bisa diketahui setelah dilakukan analisis terhadap perilaku pemilih itu sendiri, dengan beberapa pendekatan di antaranya pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasionalis.

3. 1 Citra Kandidat

3. 1.1 Artikulatif

Artikulatif yang digambarkan dalam citra kandidat ini mengacu pada ucapan yang keluar dari seorang kandidat. Tentang bagaimana seorang kandidat dengan kata-katanya yang jelas dan mudah dimengerti menyampaikan visi dan misinya dalam kampanye atau dalam kesempatan lain saat berbincang dengan masyarakat awam.

3. 1.2 Welas asih

Welas asih adalah komponen selanjutnya setelah artikulatif yang harus melekat pada citra seorang kandidat. Seperti yang diketahui bahwa citra kandidat adalah salah satu modal yang harus dimiliki oleh seorang kandidat peserta pemilihan umum. Karena, selain untuk memperoleh simpati dari masyarakat terutama pemilih, seorang calon pemimpin jika sudah terpilih tentunya akan memiliki kebijakan dan kebijakan tersebut akan dipandang kemudian dilaksanakan dengan baik apabila pemimpin tersebut memiliki sifat yang welas asih.

Tidak terlepas dari yang telah disebutkan di atas, sifat welas asih seorang kandidat dapat dilihat dari cara kandidat berkampanye pada pemilihan umum kepala daerah Pontianak tahun 2013 dan salah satu caranya yaitu blusukan. Seperti yang kita ketahui gaya blusukan telah lama

diterapkan oleh kandidat pemilihan umum maupun presiden pada setiap masanya, namun begitu tenar dan menjadi andalan ketika pemilihan presiden era Joko Widodo. Tidak terlepas dari itu, pemilihan umum kepala daerah yang juga menggunakan blusukan sebagai media kampanye, para kandidat menyambangi daerah-daerah yang telah ditentukan untuk blusukan itu sendiri.

3. 1.3 Energik

Energik dalam penelitian ini bermakna kandidat memiliki energi yang positif dalam membangun kepercayaan masyarakat. Selalu bersemangat dalam berbagai kesempatan, terlebih saat menyampaikan visi misi yang dimiliki.

3. 1.4 Jujur

Seorang dapat dipercaya oleh banyak orang apabila selalu menjunjung tinggi kejujuran. Sangat sulit menjaga sebuah kejujuran, kendati demikian, kejujuran merupakan komponen yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Dengan kejujuran seorang pemimpin, misalnya tidak melakukan praktek korupsi dan selalu dapat menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya.

3. 1.5 Tegar

Komponen dari citra kandidat yang terakhir yaitu tegar. Tegar dalam citra

kandidat mengartikan seorang kandidat yang tidak mudah goyah terhadap apa yang telah disampaikan serta dijanjikannya dalam hal ini visi dan misi kampanye.

3. 2 Identifikasi partai

Identifikasi partai merupakan faktor yang penting untuk memahami perilaku pemilih. Akan tetapi, dengan teori identifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dari Pemilu ke Pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama. Orang tersebut seolah-olah bergeming atau tidak terpengaruh oleh perubahan dunia sekitar. Dengan sendirinya pula, seolah-olah seseorang tidak terpengaruh komunikasi politik menjelang dan saat kampanye politik.

3. 2.1 Dukungan Terhadap Partai Politik

Menurut Rusli (1991: 8), keterwakilan politik rakyat tidak semata-mata ditentukan oleh pemilu tetapi yang lebih penting adalah seberapa jauh partai politik dapat memainkan perannya secara aktif di dalam segenap proses politik, bahkan jika dilacak lebih jauh dari lagi dari sejarah pemilihan umum dapat diketahui bahwa pemilu merupakan satu-satunya cara untuk mewadahi keikutsertaan rakyat dalam politik melalui partai politik. Tidak hanya itu, demokrasipun baru dapat

direalisasikan manakala terdapat partai politik dan pemilihan umum.

Rusli juga mengatakan hubungan antara partai dan pemilu dapat disimak dalam pendapat Huckshorn. Melalui partai kita dapat memilih pemimpin bangsa; membantu menjalankan mesin pemilu; sebagai sarana kampanye politik; mengawasi kegiatan-kegiatan kaum ekstrimis dari kedua sisi spektrum politik; mendorong diskusi umum tentang isu-isu penting; dan yang terpenting, berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Rusli (1991: 9)

3. 2.2 Basis Partai Di Kelurahan Bansir Laut

Pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pontianak, partai-partai yang mengusung kandidat berdasarkan Salinan Keputusan Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : 35/Kpts/KPU-Kota-019.435761/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013, di antaranya Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Buruh, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Partai Demokrat, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Nasional Indonesia Marhanisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Golongan Karya, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Patriot.

3. 2.3 Ikatan Terhadap Partai

Dukungan terhadap kandidat menurut Sofyan Zainal dapat dilihat dari figur dari kandidat perseorangan. Namun jika bicara mengenai isu dan kebijakan yang di bandingkan dengan partai Sofyan mengatakan bahwa partai hanyalah sarana bagi seorang kandidat. Lain halnya dengan kebijakan yang pasti dan harus dijalankan oleh seorang kandidat apabila terpilih sedangkan isu adalah sesuatu yang bisa dibentuk, baik dari kandidat, partai pengusung, relwan, maupun masyarakat secara umum.

3. 3 Issue and Policies (Isu dan Kebijakan Politik)

Isu dan kebijakan politik, komponennya mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu. Platform yang sering ditawarkan oleh kandidat pemilu kepada pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan kebijakan keamanan,

kebijakan hukum, kebijakan mengenai pendidikan dan karakteristik kepemimpinan. Pembahasan dari penelitian yang dilihat dari sisi isu dan kebijakan politik seperti yang dikatakan oleh Adman Nursal dapat dilihat dari dua hal yaitu visi misi serta kebijakan dan program yang dijanjikan pada masa kampanye.

3. 3.1 Visi dan misi kandidat pada saat kampanye

Pada pelaksanaan kampanye yang berlangsung dari tanggal 4-15 september 2013 seperti biasa, visi dan misi kampanye merupakan senjata yang harus dipersiapkan sedemikian rupa, sebab visi dan misi kampanye merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan seorang dalam memilih.

3. 3.2 Kebijakan dan program yang ditawarkan saat kampanye

Dalam implementasinya, pelaksanaan pemilu di beberapa daerah berlangsung aman dan sukses, namun disebagian daerah, pelaksanaanya melahirkan konflik politik di antara para kandidat beserta para pendukungnya. Bahkan lebih jauh konflik politik itu melebar menjadi sengketa hukum.

Timbulnya pemilu di atas pada umumnya disebabkan oleh pelanggaran –

pelanggaran yang dilakukan pendukung atau tim sukses dari kandidat, baik yang bersifat administratif maupun pelanggaran berat yang terkait dengan tindak pidana. Pelanggaran yang bersifat administratif misalnya terlihat pada praktek-praktek pelaksanaan kampanye (curi start dalam kampanye), praktek money politics, pemasangan tenda gambar, umbul-umbul dan media kampanye lainnya yang melanggar aturan dan seterusnya.

Di samping itu pelanggaran juga terjadi pada proses perhitungan suara yang melibatkan petugas penyelenggara pemilu: seperti penggelembungan suara oleh petugas di TPS dan yang paling rawan terjadi di KPPS. Inilah yang membuat sebagian kandidat merasa dirugikan beserta partai politik pendukungnya merasa tidak puas, kemudian melakukan gugatan ke pengadilan. Bahkan sebagian pendukung kandidat melakukan tindakan yang anarkis seperti membakar dan merusak kantor KPUD, kantor parpol pendukung kandidat dan sebagainya.

D. KESIMPULAN

1. Citra kandidat

Citra kandidat adalah hal yang paling dominan yang dijadikan masyarakat dalam memilih. Hal tersebut dapat dilihat dari

indikator indikator yang terdapat dalam citra kandidat itu sendiri yang di antaranya artikulatif dalam berbicara, memiliki sifat yang welas asih, energik dalam setiap kesempatan, jujur dalam berkata serta memiliki jiwa yang tak mudah tergoyahkan atau tegar. Indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, dinilai oleh sebagian besar warga terdapat dalam kandidat walikota nomor urut tiga, yang tidak lain adalah Sutarmidji. Sedangkan Zulkarnaen Siregar sebagai kandidat wali kota pendatang baru dengan nomor urut enam yang memiliki visi yang sama dalam hal pendidikan dengan Sutarmidji ternyata belum bisa meyakinkan bahkan memenangkan hati pemilih di kelurahan Bansir Laut. Masyarakat yang kian cerdas tidak hanya melihat kandidat dalam masa kampanye yang kebanyakan hanyalah retorika belaka, di era elektronik semua hal bisa diakses sehingga dengan mudah masyarakat dapat melihat rekam jejak dari setiap kandidat yang mengikuti gelaran pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian pilihan akan tetap dihadapkan pada kandidat yang menurut mereka lebih baik dibandingkan dengan kandidat lainnya baik dari informasi yang didapat maupun dari rekam jejaknya sebagai pemimpin.

2. Identifikasi Partai

Loyalitas pada partai tidak selamanya akan berdampak pada terpilihnya seorang kandidat besutan partai tersebut. Tetapi lain halnya jika kandidat yang berasal dari partai tersebut adalah kandidat yang kuat secara personal sehingga secara serentak pemilih yang telah sejak awal loyal pada suatu partai akan memilih kandidat dari partai tersebut. Adanya PPP sebagai partai yang banyak dipilih oleh masyarakat dikelurahan Bansir laut, tidak serta merta membuat pilihan masyarakat terpusat pada partai tersebut untuk memilih siapa saja kandidat yang diusung oleh PPP tersebut. Pilihan yang dijatuhkan pada Sutarmidji yang *nota bene* adalah kandidat yang diusung oleh partai ternyata tidak serta merta karena ikatan kuat ataupun loyalitas kepada partai, melainkan figur seseorang yang terbangun dari citra kandidat yang dimiliki Sutarmidji. Kandidat selanjutnya dalam bahasan skripsi ini yaitu Zulkarnaen Siregar, kandidat dengan nomor urut enam ini merupakan figur baru yang belum banyak masyarakat yang mengenalnya, selain itu Zulkarnaen maju dalam persaingannya dengan kandidat wali kota yang lain dengan jalan Independen, sehingga masyarakat semakin asing dengan nama bahkan rekam jejaknya di dunia politik.

3. Isu dan Kebijakan

Beragamnya visi dan misi yang dihadirkan oleh setiap kandidat demi mendapatkan hati masyarakat, membuat tidak hanya kandidat yang bekerja keras dalam memutar otak untuk menghasilkan visi dan misi yang menarik akan tetapi kecerdasan masyarakat dalam menyaring dan memilih visi dan misi yang terbaik yang dapat membawa Pontianak menjadi kota yang lebih baik dan maju. Platform yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan kebijakan keamanan, kebijakan hukum, kebijakan mengenai pendidikan hingga karakteristik kepemimpinan. Salah satu visi disampaikan dari dua kandidat yang memiliki kesenjangan pada hasil pemilihan pemimpin daerah tahun 2013 lalu yaitu isu mengenai pendidikan yang disampaikan oleh kandidat nomor urut tiga dan nomor urut enam. Mengenai isu pendidikan yang ditampilkan dalam visi dan misi tersebut, kelurahan Bansir Laut yang terdapat di pusat Kota Pontianak juga merupakan pusat pendidikan di kota ini bahkan di Kalimantan Bara secara keseluruhan. Selain itu masyarakatnya sebagian besar adalah masyarakat berpendidikan sehingga mereka juga dimasukkan kedalam masyarakat yang cerdas dalam memilih.

E. SARAN

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih di Kelurahan Bansir Laut ini telah sampai pada saran. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti faktor-faktor tersebut dari tiga indikator yang disampaikan oleh Adnan Nursal sebagai pisau analisis penelitian ini, sehingga peneliti merasa bahwa penelitian ini masih belum maksimal karena belum bisa menghadirkan keseluruhan indikator tersebut. Adapun indikator yang dimaksud antara lain *social imagery* atau citra sosial, identifikasi partai, *emotional feeling* atau perasaan emosional, *candidate personality* atau citra kandidat, *issue and policies* atau citra kebijakan, *current events* atau peristiwa mutakhir, *personal events* dan *epistemic issues*. Kemudian peneliti berharap agar peneliti selanjutnya yang memilih perilaku pemilih untuk penelitiannya agar bisa menggunakan indikator yang lebih banyak dengan sudut pandang yang berbeda agar penelitiannya lebih lengkap dan semakin mudah untuk dipahami. Selain itu isu yang ditampilkan juga menjadi hal yang penting untuk dibahas, sebagai contoh isu pendidikan yang dihadirkan dalam penelitian ini. Isu pendidikan serta faktor lingkungan sangat mempengaruhi perilaku politik seseorang. Jadi, jika pendidikan politik yang dimiliki tidak cukup memadai,

maka diskusi adalah pilihan yang tepat untuk mempertajam wawasan serta dapat memilih kandidat pemilu dengan tepat.

F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Aminah, Ida Nur. 2014. Strategi Politik Calon Legislatif Incumbent Pada Pemilu 2014. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar.

Ashari, Hasyim. 2013. SMS Mengubah Pontianak, Interaksi Wali Kota Sutarmidji dengan Warganya. Pontianak : TOP Indonesia

Budiardjo, Miriam 1996. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Damsar. 2010 Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana

Hollyson, Rahmat dan Sri Sundari. 2015. Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna. Jakarta: Bestari Buana Murni

Huntington, Samuel P. dan Nelson. 1994. Partisipasi Politik Di negara Berkembang Jakarta: Rineka Cipta

Irtanto. 2008. Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

J Prihatmoko, Joko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Karim, M. Rusli. 1991. Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya

Nimmo, Dan.2000.Komunikasi Politik Khalayak dan Efek.Bandung: PT.Remaja Rosda Karya

Nursal, Adman. 2004. Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu. Jakarta: Gramedia

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Suharizal. 2011. Pemilu: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

2009. Undang-Undang Politik. Bandung: Fokus Media

Tilaar. 2006. Standard Pendidikan Nasional (Suatu Tinjauan Kritis) Rineka Cipta: Jakarta

Toni Adrianus Pito, Efriza, Kemal Fasyah. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik, Bandung : Nuansa

Yustian, Yuddi, 2008. Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent Dan Pendaftar Baru Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Fakultas Pertanian Universitas Pertanian Bogor

Sumber Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Pontianak_2013
diakses pada hari sabtu 26/09/2015 pukul 1:30

http://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=23&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=
diakses pada hari rabu 16/09/2015 pukul 16:45

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/05/sistem-kepartaian-di-indonesia.html>
diakses pada hari rabu 16/09/2015 pukul 18:38

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Pontianak_2013
diakses pada hari rabu 16/09/2015 pukul 18:52

<http://www.diskusilepas.com/2014/03/mengenali-jenis-jenis-pemilih-pada.html?m=1>
diakses pada hari selasa 05/01/2016 pukul 16:35

<http://www.pilwakopontianak.com/halagen-2.html>
diakses pada hari kamis 06/09/2016



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.unn.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Asinda Zain
NIM / Periode Julus : 5021005
Tanggal Lulus : 27 Januari 2023
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Politik
E-mail address/ HP : asinda72@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Aspirasi (*) pada
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah
saya yang berjudul (**):

Teknik- Teknik yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam
Pemilihan Kepala Daerah Pontianak tahun 2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

Asinda Zain
NIM : 5021005

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika Governance Aspirasi Sociodem Sociologique*)

Serelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)